

LAPORAN

FORUM KONSULTASI PUBLIK

2025



PPN Kejawanan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Kegiatan Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawanen dapat terlaksana. Forum Konsultasi Publik ini mengundang para pengguna jasa pelabuhan, instansi terkait dan dari akademisi.

Forum konsultasi publik merupakan suatu cara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan. Selain untuk mendapatkan masukan dan saran dari publik terhadap prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah, forum konsultasi publik juga merupakan sarana menyerap aspirasi sekaligus mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Publik di PPN Kejawanen. Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan masa mendatang.

Cirebon, 10 November 2025

Kepala Pelabuhan,

Yusuf Fathanah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	2
C. Ruang Lingkup	3
II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP	4
A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	4
B. Penyelenggara dan Peserta FKP	4
C. Metode Pelaksanaan FKP	5
D. Susunan Acara FKP	5
III. HASIL PELAKSANAAN FKP	6
A. Identifikasi Masalah	6
B. Analisis	6
C. Rencana Aksi	7
IV. PENUTUP	8
LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani	
LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir	
LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan	
LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan	
LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Upaya dalam melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik diwujudkan dalam bentuk Forum Konsultasi Publik (FKP).

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan.

Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan menyelenggarakan FKP secara berkala dengan melibatkan stakeholder, instansi mitra dan juga akademisi. Forum Konsultasi Publik ini dilakukan sebagai wadah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

B. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

1. memberikan kesempatan kepada masyarakat (*stakeholder*) untuk memberikan usulan, masukan dan saran terkait dengan layanan yang diterima;
2. memperoleh pemahaman dan solusi atas permasalahan terkait:
 - a. Pembahasan rancangan kebijakan;
 - b. Penerapan kebijakan;
 - c. Dampak dan Evaluasi kebijakan.

Manfaat dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik adalah sebagai berikut:

1. Secara umum, FKP dapat menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik;
2. Bagi penyelenggara :
 - a. Memperoleh masukan dari publik terkait kebijakan (mulai dari perumusan sampai dampak);
 - b. Sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik;
 - c. Sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan.

3. Bagi Publik:

- a. Ruang partisipasi masyarakat;
- b. Memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
- c. Memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;
- d. Menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan;
- e. penyelenggara layanan;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas dan mengevaluasi Standar Pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan.

II. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu pelaksanaan kegiatan FKP ini adalah pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025 dimulai pukul 08.30 WIB sd selesai;
2. Tempat pelaksanaan FKP ini adalah di Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Jl. Pelabuhan Perikanan No. 1 Cirebon.

B. Penyelenggara dan Peserta FKP

1. Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan;
2. Peserta Forum Konsultasi Publik adalah dari:
 - Pangkalan TNI AL (LANAL) Cirebon
 - Babinsa
 - BP2MHKP Cirebon
 - Satwas PSDKP Cirebon
 - Dekan FPIK Universitas 17 Agustus
 - Yayasan Pancaran Kasih Grage
 - Redaksi dialogindonesia.com
 - HNSI Kota Cirebon
 - Pengguna Layanan
 - Pemilik Kapal
 - Investor di PPN Kejawanan
 - Ketua Tim Kerja Lingkup PPN Kejawanan
 - Petugas Pelayanan PPN Kejawanan

C. Metode Pelaksanaan FKP

1. Forum Konsultasi Publik dilaksanakan dengan bentuk dialog interaktif atau diskusi dua arah antara penyelenggara dan para peserta perwakilan *stakeholder* guna mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pengurusan perizinan atau pelayanan publik yang lain;
2. Pada akhir kegiatan dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara, sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dan komitmen terhadap masyarakat.

D. Susunan Acara FKP

Waktu (WIB)	Kegiatan	Penanggung Jawab	Ket
08.30 – 08.45	Registrasi Peserta	Panitia	
08.45 – 09.00	Pembukaan:		
	- Pembukaan acara oleh MC	MC	
	- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya	Panitia	
	- Do'a	Panitia	
09.00 – 09.15	Sambutan	Kepala PPN Kejawanan	
09.15– 10.30	Diskusi	Kasubbag Umum	
10.30 – 11.00	Pembacaan dan Penandatanganan Berita Acara	Panitia	

III. HASIL PELAKSANAAN FKP

A. Identifikasi Masalah

1. Menindaklanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, terdapat beberapa pelayanan yang harus menyesuaikan nama pelayanan dan produk pelayanannya, seperti :
 - a. Pelayanan Pas Harian dan penggunaan halaman wisata bahari menjadi Pelayanan Wisata Bahari
 - b. Pelayanan Pas menjadi Masuk Harian dan Berlanggan Pelayanan Pas Masuk
 - c. Pelayanan tambat dan/atau labuh dan Floating repair menjadi Pelayanan Tambat dan/atau labuh di Pelabuhan Perikanan
2. Pada Kegiatan FKP di sampaikan pula hasil Survey Kepuasan Masyarakat Triwulan III Tahun 2025 dengan komponen terendah terdapat pada unsur Kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Perlunya perbaikan untuk kantor keamanan, adanya mobil kebakaran dan ambulance untuk kejadian kegawatdaruratan, penerangan dikawasan dermaga ke arah laut minim dikhawatirkan berkembangnya tindak kejahatan pencurian, dan perlunya puskesmas dan rumah sakit apung untuk menunjang kesehatan nelayan.
4. Banjir Rob di kawasan pemukiman yang berasal dari saluran drainase.

B. Analisis

Terhadap indentifikasi masalah tersebut di atas, dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Penyesuaian nama dan produk pelayanan yang terdapat di PPN Kejawanan sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan.
2. Perlunya penambahan fasilitas sebagai tindaklanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat.

3. Perlunya adanya koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait usulan penyediaan rumah sakit atau puskesmas apung bagi nelayan.
4. Perlunya kegiatan normalisasi saluran drainase untuk menghindari banjir akibat rob.

C. Rencana Aksi

1. Menetapkan pelayanan dengan membuat Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.
2. Menambah fasilitas MCK dan Rumah bilas serta pos kesehatan di kawasan Wisata Bahari Kejawanan.
3. Menambah fasilitas penerangan dan menyampaikan surat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait usulan penyediaan rumah sakit atau puskesmas apung bagi nelayan.
4. Melaksanakan kerja bakti dan pengerukan saluran drainase.

IV. PENUTUP

Dengan telah dilaksanakannya Forum Konsultasi Publik ini, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan berkomitmen untuk :

1. Segera menindaklanjuti hasil dari FKP;
2. Hasil rekomendasi dan rencana aksi yang diperoleh dalam FKP ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan kebijakan pelayanan yang lebih baik.

LAMPIRAN I Berita Acara yang Ditandatangani



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO. 1 CIREBON 45113
TELEPON (0231) 210084, EMAIL : ppn.kejawanan@kkp.go.id
LAMAM www.kkp.go.id/djpt/ppnkejawanan

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DAN REVIU STANDAR PELAYANAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN Nomor: B.2294/PPNK/OT.710/X/2025

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka reviu Standar Pelayanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan. Adapun hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut :

1. Telah disampaikan 19 nama layanan di PPN Kejawanan antara lain :
 - 1) Penerbitan Persetujuan Berlayar
 - 2) Penerbitan STBL Kedatangan
 - 3) Pelayanan Aktivasi e-logbook penangkapan ikan
 - 4) Pengesahan Perjanjian Kerja Laut
 - 5) Penerbitan Sertifikat kelaikan kapal perikanan izin daerah
 - 6) Penerbitan Perjanjian Sewa BMN di Pelabuhan Perikanan
 - 7) Penggunaan Ruang Pertemuan
 - 8) Pas harian wisata bahari
 - 9) Pas masuk harian
 - 10) Pemakaian listrik
 - 11) Pelayanan tambat dan/atau labuh
 - 12) Kebersihan kawasan di pelabuhan perikanan
 - 13) Pemanfaatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 - 14) Pengadaan Air
 - 15) Penerbitan Sertifikat Hasil Penangkapan Ikan
 - 16) Penggunaan Kawasan di Pelabuhan Perikanan
 - 17) Penggunaan Halaman Wisata Bahari
 - 18) Pelayanan Penggunaan Transportasi Kendaraan Pengangkutan
 - 19) Floating Repair

berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan terdapat perubahan sebagai berikut :

No	Sesudah permenKp 20 Tahun 2025	No	Produk Layanan	Keterangan
1	Penerbitan persetujuan berlayar	1	Persetujuan berlayar	Pelayanan yang semula berjumlah 19 pelayanan kemudian setelah dievaluasi sesuai Kepmen 20 tahun 2025 menjadi 16 Jenis pelayanan.
2	Penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	2	Surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan	
3	Pelayanan Aktivasi e-logbook penangkapan ikan	3	Akun e-logbook penangkapan ikan yang teraktivasi	
4	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut	4	Pengesahan perjanjian kerja laut	
5	Penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan	5	Sertifikat kelaikan kapal perikanan	
6	Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk menunjang kegiatan perikanan	6	Penerbitan Perjanjian Sewa BMN di Pelabuhan Perikanan	
		7	Penggunaan Ruang pertemuan	
7	Wisata Bahari Pelabuhan Perikanan	8	Pas Harian	
		9	penggunaan halaman	
8	Pas masuk	10	Pas masuk harian	
		11	Pas masuk berlangganan	
9	Pemakaian listrik di kawasan Pelabuhan Perikanan	12	Listrik	
10	Tambat dan/atau labuh di Pelabuhan Perikanan	13	Tambat dan/atau labuh untuk kapal perikanan dan kapal nonperikanan	
		14	Surat Pemberitahuan Floating Repair disetujui	
11	Kebersihan di kawasan pelabuhan perikanan dan kolam pelabuhan	15	Kebersihan	
12	Instalasi Pengolahan Air Limbah	16	Hasil pengolahan air limbah	
13	Pengadaan Air	17	Air	
14	Penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan	18	Sertifikat hasil tangkapan ikan	
15	Penggunaan Kawasan Pelabuhan Perikanan	19	Penggunaan kawasan pelabuhan perikanan	
16	Penggunaan Transportasi	20	kendaraan/pengangkutan	

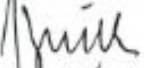
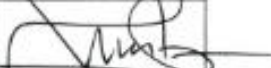
2. Penyampaian hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) pada Triwulan III Tahun 2025 dengan nilai 94,88 dengan predikat sangat baik. Adanya unsur terendah pada kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana.
3. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan Bersama menyatakan sebagai berikut :

No	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1	Penyesuaian Nama Pelayanan dan Produk Pelayanan Sesuai Kepmen 20 Tahun 2025	Menetapkan pelayanan dengan membuat Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Triwulan IV Tahun 2025
2	Nilai Terendah dalam SKM adalah kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana khususnya di kawasan Wisata Bahari Kejawanan yaitu kurangnya ketersediaan rumah bilas dan fasilitas pos kesehatan	Menambah fasilitas MCK dan rumah bilas dan menyediakan fasilitas kesehatan di Kawasan Wisata Bahari	Triwulan IV Tahun 2025
3	Perlunya perbaikan untuk kantor keamanan, adanya mobil kebakaran dan ambulance untuk kejadian kegawatdaruratan, penerangan dikawasan dermaga ke arah laut minim dikhawatirkan berkembangnya tindak kejahatan pencurian, dan perlunya puskesmas dan rumah sakit apung untuk menunjang kesehatan nelayan.	- Penambahan fasilitas penerangan di area bagian barat maupun bagian timur. - Menyampaikan surat kepada KKP terkait usulan menyediakan puskesmas/rumah sakit apung	Triwulan IV Tahun 2025
4	Banjir Rob di kawasan pemukiman yang berasal dari saluran drainase	- Tersedia rencana desain drainase dalam rencana pengembangan PPN Kejawanan - Normalisasi saluran dengan melaksanakan kerja bakti dan pembersihan drainase agar saat rob tidak menyebabkan banjir ke kawasan pemukiman	Triwulan IV Tahun 2025

Pimpinan unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan proses tindak lanjut oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama

Demikian berita acara ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Nama	No. HP	Jenis Kelamin (L/P)	Perwakilan	Tanda Tangan
1	Amin Chandra	085220844556	L	Pemilik Kapal	
2	Hartono	08112425735	L	Pemilik Kapal	
3	Abdul Sentosa	085200200088	L	Pemilik Kapal	
4	Bayu R	081228222995	L	PT. Perdana Investama Mina	
5	Didha Andini Putri	085742131301	P	Dekan FPIK Universitas 17 Agustus	
6	Misak Andriana	082319680091	L	Ketua RW	
7	Asep Ruhayat	082161109991	L	Satwas SDKP Cirebon	
8	Karsudin	081224873667	L	HNSI Kota Cirebon	
9	M. Hasan Hidayat	085320822227	L	dialogindonesia.com	

*) Penandatanganan adalah perwakilan dari peserta Forum Konsultasi Publik

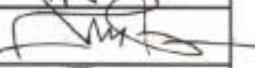
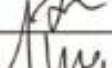
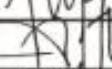
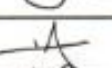
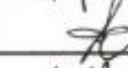
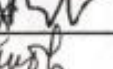
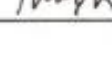
Kepala PPN Kejawanan  Yusuf Fathanah, S.Pi, M.Si	Kasubbag Umum  Udin Casrudin, SE. MM.
---	---

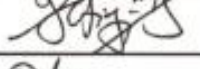
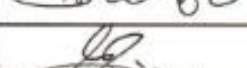
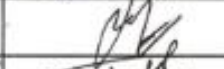
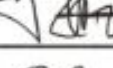
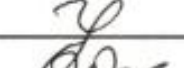
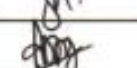
*) Penandatanganan adalah pimpinan instansi dan perwakilan pelaksana pelayanan

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

DAFTAR HADIR

Tanggal : 30 Oktober 2025
 Hari : Kamis
 Tempat : Aula PPN Kejawanan
 Agenda : Evaluasi Forum Konsultasi Publik

No.	Nama	Instansi	Tanda tangan
1	Asep	Kapal Sewa KPR	
2	Yusuf Hetta PM	Laman Cirebon	
3	Asep R	PSDKP	
4	Amin Idris	Pemilik	
5	Harsono	pemilik	
6	Widy Purnama	"	
7	Budi Hermanto	pemilik kapal	
8	Haram	Diary Indonesia	
9	HANSI KARSIDIN	HANSI	
10	Didha Andini Putri	UMTAS CIREBON FPIK	
11	Joni	Pemilik kapal	
12	Djamil	Pemilik kapal	
13	Lukman	—li—	
14	MISAK Andriana	PN 05 Kejawanan	
15	Mesruri	PT PIM	
16	Yusean.	BAPUKEP Cirebon	
17	Sugarto Wiyaya	pemilik	
18	Yusuf Tudiawan	PT Samba Perikanan Mandiri	
19	Yanto	Babinsa	
20	Suhariyanto	PT. LAN OUTAS	
21	ABDUL.	W. EJS	
22	Saipul Aghni	pemilik	
23	ISKAN RIYANTO	Pengurus kapal	
24	Udin Asmudi	PNK	
25	Tarek	PNK	

26	IRVAN SETIAWAN	PPN K	
27	Meisha F	PPN K	
28	Setiaji Sumaryo	PPN K	
29	Picha Riandimas	PPN K	
30	Dewi Dasmirah	PPN K	
31	Shandra Dewi A	PPN K	
32	Endang S.	PPN K	
33	Nitigit Purnama.	PPN K	
34	Naurman Robi Putra.	PPN K	
35	Sansya	PPN K	
36	Sri Handayani	PPN K	
37	Ivan Somantri	PPN K	
38	Johan P	PPN K	
39	Carouna - San R	PPN K	
40	Ageng Paul. P	PPN K	

LAMPIRAN III Salinan Surat Undangan



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113
TELEPON (0231) 210084, FAKSIMILE (0231) 231383
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL ppn.kejawanan@kkp.go.id

Nomor : B.2279/PPNK/TU.330/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Undangan Evaluasi Forum Konsultasi Publik (FKP)

28 Oktober 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan, dengan ini kami mengundang Saudara/i untuk menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang akan diselenggarakan pada :

hari, tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025
waktu : 08.30 s.d selesai
tempat : Aula Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan
Jl. Pelabuhan Perikanan No.1, Cirebon
acara : Evaluasi Forum Konsultasi Publik

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yusuf Fathanah

Lampiran

Nomor : B.2279/PPNK/TU.330/X/2025

Tanggal : 28 Oktober 2025

**DAFTAR UNDANGAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) DI PELABUHAN
PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN**

NO	NAMA / INSTANSI	KETERANGAN
1	Udin Casrudin	Kepala Subbagian Umum PPN Kejawanan
2	Sri Handayani	Ketua Tim Kerja TKPU PPN Kejawanan
3	Muklis	Ketua Tim Kerja Operasional PPN Kejawanan
4	Nurdiyana Sigit Purnama	Ketua Tim Kerja Kesyahbandaran PPN Kejawanan
5	Petugas Pelayanan PPN Kejawanan	9 Orang
6	Satwas SDKP Cirebon	1 Orang
7	Kepala BP2MHKP Cirebon	1 Orang
8	Komandan Lanal Cirebon	1 Orang
9	Kepala Polsek KPC	1 Orang
10	Babinsa	1 Orang
11	Dekan FPIK Universitas 17 Agustus	1 Orang
12	Yayasan Pancaran Kasih Grage	1 Orang
13	Pimpinan Redaksi dialogindonesia.com	1 Orang
14	Ketua HNSI Kota Cirebon	1 Orang
15	Misak Andriana	Ketua RW. 05 Kejawanan
16	Budiyanto	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
17	Budi Hermanto	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
18	Djamal	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
19	Joni	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
20	Alek Sander	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
21	Abdul Sentosa	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
22	Subandi	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan

23	Taryoni / Lukman	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
24	Amin Chandra	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
25	Mike Tugiman	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
26	Sugiarto Wijaya	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
27	Widy Purnama	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
28	PT. Perdana Investama Mina	Investor di PPN Kejawanan
29	PT. Pan Putra Samudra	Investor di PPN Kejawanan
30	PD. Sambu	Investor di PPN Kejawanan
31	Iskak Riyanto	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan
32	Saiful Aghni	Pemilik Kapal di PPN Kejawanan

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Yusuf Fathanah

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan



LAMPIRAN V Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO.1 CIREBON 45113
TELEPON (0231) 210084
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ppn_kejawanan@kkp.go.id

LAPORAN TINDAK LANJUT FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN
TAHUN 2024

Berdasarkan Berita Acara Hasil Forum Konsultasi Publik Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan yang telah ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2025. Berikut dilaporkan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan yang telah dilakukan antara lain:

No	Identifikasi Masalah	Rekomendasi Perbaikan	Tindak Lanjut
1.	Ketersediaan air yang menghambat proses produksi	Berkordinasi dengan Pihak PDAM	Telah dilaksanakan koordinasi dengan PDAM untuk pengecekan saluran air pada tanggal 21 November 2024 
2.	Terdapat pelayanan yang sudah tidak bisa dilaksanakan oleh PPN Kejawanan disebabkan adanya peralihan fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu : 1. Pelayanan Penerbitan Surat Rekomendasi Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan (Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2020	Menghapus standar pelayanan yang sudah tidak digunakan pada penetapan standar pelayanan hasil review	Melalui penetapan dokumen standar pelayanan pada tanggal 04 November 2024

	tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah) 2. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin dan, Freezer dan Cold Storage (telah disewa seluruhnya oleh Pihak Ke-3) 3. Pelayanan Inspeksi Pengendalian Mutu (Beralih wewenangnya ke Badan Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan PermenKp Nomor 16 Tahun 2024 tentang Tentang kewenangan Pembinaan dan pengendalian dlm rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan) 4. Pelayanan Penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) (Beralih wewenangnya ke Badan Pengendalian dan Pengawasan mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berdasarkan PermenKp Nomor 16		
--	---	--	--

	Tahun 2024 tentang Tentang kewenangan Pembinaan dan pengendalian dlm rangka penerbitan sertifikat jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan) 5. Pelayanan Data dan Informasi Publik (Beralih Beralih ke Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berdasarkan Permen KP RI No 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Komisi Informasi RI No 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik)		
--	--	--	--

Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

Cirebon, 02 Desember 2024

Kepala PPN Kejawanan



Sanjono, A.Pi